

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah selaku pihak yang diberi kepercayaan oleh warga negara dalam mengelola dana yang ada telah melakukan reformasi sistem pengelolaan keuangan. Reformasi ini salah satunya dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Reformasi sistem pengelolaan keuangan sektor publik mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2010).

Hal tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat atau daerah.

Laporan Keuangan BUMDes merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pengelola BUMDes selama satu periode. Laporan keuangan pengelola BUMDes diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Tujuannya agar laporan keuangan lebih *accountable* dan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Pemerintah beserta pihak terkait berusaha dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan mengambil kebijakan menetapkan PP Nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005 dengan tujuan mengubah basis kas menjadi basis akrual guna meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Christensen (2002) menyatakan reformasi akuntansi pemerintahan menjadi langkah pertama dari kebijakan modernisasi pemerintah untuk organisasi publik. Oleh karena itu, pelaksanaan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi memainkan peran penting dan dominan dalam pelaksanaan dan keberhasilan *New Public Management* (NPM) terkait praktik dan teknik dalam organisasi publik. Jika reformasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka tujuan dan harapan memasyarakatkan reformasi tersebut akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan informasi manajerial dan

keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukung dan memfasilitasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai alat kontrol yang menghasilkan informasi internal. Rostami dan Mongadam (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Organisasi menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang diintegrasikan dengan Teknologi Informasi (TI) dalam pengolahan data. Jika keduanya tidak berjalan dengan baik dapat menghasilkan *output* yang dapat melemahkan kinerja dari organisasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa kelemahan yang dijumpai.

1. Belum adanya dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran atau arus data sejak data mentah sampai dengan informasi tercetak. Persoalan ini terlihat sederhana, tetapi dapat menyulitkan pihak pimpinan BUMDes dalam mengawasi arus informasi yang terdapat dalam organisasi yang dipimpinnya.
2. Lemahnya *Data Management Systems*. Ini terbukti dari belum adanya standar operasi yang baku, munculnya eksekusi *overflow reporting*, *redundancy* yang tidak efisien dan sebagainya.

3. Tata ruang perkantoran masih kurang memadai. Ruang untuk kegiatan-kegiatan ketatausahaan (tulis-menulis), operasi komputer, atau penyortiran data masih bercampur satu dengan yang lainnya, sehingga pekerjaan menjadi kurang sistematis.
4. Untuk perawatan mesin atau perangkat keras, organisasi masih menggantungkan diri kepada pihak pemasok dengan sistem kontrak per tahun. Akibatnya jika terjadi kerusakan teknis, sekalipun sangat sederhana, tidak bisa segera diatasi sendiri oleh para pegawai.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai penyusun laporan keuangan kurang ahli. Beberapa sumber daya manusia yang ada tidak memiliki latar belakang bidang ekonomi atau akuntansi, bahkan terkadang petugas penyusun laporan keuangan tidak mengetahui apa yang dilakukan.

Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dapat dimaknai sebagai wujud hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Moe (1984), hubungan prinsipal dan agen dapat dilihat dalam konteks politik demokrasi. Peran agen dilakukan oleh pengelola BUMDes yang mendapatkan dana dari masyarakat dan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana masyarakat tersebut melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, sehingga diperlukan laporan keuangan yang berkualitas.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pihak yang paling mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia dalam hal ini yaitu karyawan yang bertugas menyusun laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Komala (2012), Fatimah (2013), Ihsanti (2014), Ole (2014), dan Nurillah (2014) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kualitas sumber daya manusia tidak baik maka hampir bisa dipastikan kualitas laporan keuangan tidak baik. Hasil penelitian tersebut, berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfiyanti (2011), Sukmaningrum (2012), dan Al-Hiyari *et., al.*(2013) dimana kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang tidak konsisten ini, dimungkinkan karena adanya faktor mediasi yang mempengaruhi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Pimpinan BUMDes yang berperan sebagai manajemen puncak merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Manajemen puncak dalam hal ini memiliki wewenang dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Komala (2012), Rahayu (2012), dan Ole (2014) bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu institusi dipengaruhi oleh dukungan manajemen puncak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Setiyawati (2013) dan Al-Hiyari *et., al.* (2013), bahwa kualitas

laporan yang dihasilkan oleh suatu organisasi tidak dipengaruhi oleh dukungan dari manajemen puncak. Terdapat ketidakkonsistenan dalam hubungan antara dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena terdapat faktor mediasi mempengaruhi dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari transaksi yang terjadi. Data yang digunakan dalam hal ini diharapkan memiliki kualitas yang baik, sehingga pada saat digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan Rahayu (2012) dan Ole (2014) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan bergantung dari kualitas data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Al-Hiyari *et.,Al.* (2013) mendapatkan hasil yang berkebalikan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan.

Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu merupakan dasar dilakukannya penelitian ini. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak dan kualitas data mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga dilakukan guna mengetahui apakah implementasi sistem informasi akuntansi memediasi pengaruh kualitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak dan kualitas data terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dengan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Desa–Desa yang Memiliki BUMDes Se Kabupaten Tegal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal?
2. Apakah kualitas data berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal?
3. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal?
4. Apakah implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal?
5. Apakah implementasi sistem informasi akuntansi mampu memediasi pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal?
6. Apakah implementasi sistem informasi akuntansi mampu memediasi pengaruh kualitas data terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal?

7. Apakah implementasi sistem informasi akuntansi mampu memediasi pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal?

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dalam kualitas laporan keuangan, maka penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sarannya. Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini hanya terbatas mengenai masalah faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan, faktor-faktor tersebut antara lain: dukungan manajemen puncak, kualitas sumber daya manusia, kualitas data, dan implementasi sistem informasi akuntansi. Faktor-faktor tersebut akan diukur menurut persepsi dari responden terkait kualitas laporan keuangan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMDes dan mengenai sistem informasi akuntansi yang mampu memediasi faktor-faktor tersebut. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal.

2. Pengaruh kualitas data terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal.
3. Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal.
4. Pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal.
5. Pengaruh variabel mediasi dari implementasi sistem informasi akuntansi terhadap hubungan kualitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal.
6. Pengaruh variabel mediasi dari implementasi sistem informasi akuntansi terhadap hubungan dukungan manajemen puncak dengan kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal.
7. Pengaruh variabel mediasi dari implementasi sistem informasi akuntansi terhadap hubungan kualitas data dengan kualitas laporan keuangan pada BUMDes Se Kabupaten Tegal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi BUMDes.

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi manajemen BUMDes dalam pengambilan keputusan terutama pada kebijakan yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan hal-hal yang berkaitan dengan

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Bagi Masyarakat Umum.

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait sistem informasi akuntansi yang ada pada BUMDes. Dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai BUMDes diharapkan meningkatnya peran aktif atau partisipasi masyarakat terhadap BUMDes.

3. Bagi Akademisi.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

4. Bagi Penulis.

Penelitian ini menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pada sektor privat terutama pada usaha yang tergolong usaha kecil. Selain itu, penelitian ini menjadi tugas akhir penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang melandasi pemilihan judul, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian laporan keuangan, pengertian implementasi sistem informasi akuntansi pada BUMDes. Sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, kualitas data, kerangka pemikiran, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan cara analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, gambaran data yang terkumpul, pengujian data, dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan dibahas mengenai kesimpulan akhir, serta sasaran-sasaran yang diperlukan.